

Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan
E-ISSN 2808-246X; P-ISSN 2808-3636
Volume 6, Issue 4, October 2026; Page, 2628-2640
Email: pantherajurnal@gmail.com

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR KENJERAN SURABAYA DALAM PERSPEKTIF *GENDER* DAN PEMBANGUNAN: ANALISIS BERBASIS DATA DAN KEBIJAKAN RESPONSIF *GENDER*

Gunawan[1]* & Hayati[2]
[1]Program Studi Doktor Pertanian Berkelanjutan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115, Indonesia
[2]Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115, Indonesia
**Email: gunawan@dredolf.com*
Submit: 09-06-2026; Accepted: 19-06-2026; Published: 30-10-2026

ABSTRAK: Artikel ini menganalisis pemberdayaan perempuan pesisir Kenjeran Surabaya melalui perspektif *Gender* dan Pembangunan (*Gender and Development*/GAD). Kajian ini menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat program, melainkan sebagai aktor ekonomi dan sosial dalam rantai nilai pesisir, terutama pada pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumenter dengan menelaah data BPS Kota Surabaya, dokumen pengarusutamaan *gender* Pemerintah Kota Surabaya, dan artikel ilmiah relevan yang dapat ditelusuri. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kenjeran memiliki struktur penduduk perempuan dan laki-laki yang relatif seimbang, tetapi kepadatan wilayah, beban kerja domestik, keterbatasan akses produksi, dan posisi tawar pasar masih berpotensi menghambat pemberdayaan substantif. Dalam perspektif GAD, program pemberdayaan perlu diarahkan pada perubahan akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan akuntabilitas kelembagaan. Artikel ini menawarkan model penguatan berbasis lima komponen, yaitu data terpilah, perluasan akses produktif, penguatan agensi, integrasi pasar, dan evaluasi responsif *gender*. Model tersebut dapat memperkuat pembangunan masyarakat pesisir yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

Kata Kunci: *Gender* dan Pembangunan, Kenjeran, Masyarakat Pesisir, Pemberdayaan Perempuan.

ABSTRACT: *This article analyzes the empowerment of coastal women in Kenjeran, Surabaya, through a Gender and Development (GAD) perspective. This study positions women not only as program beneficiaries but also as economic and social actors in the coastal value chain, particularly in the processing and marketing of fishery products. The research uses a descriptive qualitative approach based on documentary studies, examining data from the Surabaya City Statistics Agency (BPS), gender mainstreaming documents from the Surabaya City Government, and relevant research articles. The study results indicate that Kenjeran has a relatively balanced population structure between women and men, but regional density, domestic workload, limited access to production, and market bargaining power still have the potential to hinder substantive empowerment. From a GAD perspective, empowerment programs need to be directed at changing institutional access, participation, control, benefits, and accountability. This article offers a five-component empowerment model: disaggregated data, expanded productive access, strengthened agency, market integration, and gender-responsive evaluation. This model can foster more equitable, sustainable, and evidence-based coastal community development.*

Keywords: *Gender and Development, Kenjeran, Coastal Communities, Women's Empowerment.*

How to Cite: Gunawan, G., & Hayati, H. (2026). Pemberdayaan Perempuan Pesisir Kenjeran Surabaya dalam Perspektif *Gender* dan Pembangunan: Analisis Berbasis Data dan Kebijakan Responsif *Gender*. *Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan, 6*(4), 2628-2640. https://doi.org/10.36312/panthera.v6i4.1680



Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan
E-ISSN 2808-246X; P-ISSN 2808-3636
Volume 6, Issue 4, October 2026; Page, 2628-2640
Email: pantherajurnal@gmail.com



Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan *is Licensed Under a CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*.

PENDAHULUAN

Komunitas pesisir merupakan ruang sosial-ekonomi yang memiliki karakteristik kompleks karena mempertemukan aktivitas perikanan, perdagangan informal, pariwisata, pengolahan pangan, kerja perawatan keluarga, serta dinamika perubahan ekologis. Karakteristik tersebut juga terlihat di Kecamatan Kenjeran, Surabaya, yang memiliki aktivitas ekonomi pesisir berbasis perikanan dan pengolahan hasil laut. Dalam struktur ekonomi tersebut, perempuan memiliki peran strategis melalui keterlibatan pada kegiatan *pra*-produksi, *pasca*-panen, pengolahan, pengemasan, pemasaran, pengelolaan pembiayaan usaha skala kecil, serta pemeliharaan jaringan sosial ekonomi keluarga. Meskipun demikian, kontribusi perempuan sering kali belum memperoleh pengakuan yang setara karena aktivitas ekonominya berlangsung di sekitar rumah tangga, bersifat informal, dan tidak selalu tercatat sebagai pekerjaan utama.

FAO (2024) menegaskan bahwa perempuan berperan besar dalam rantai nilai perikanan dan akuakultur, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan, teknologi, keuangan, informasi, pelatihan, infrastruktur, pekerjaan layak, dan posisi pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menjadi relevan untuk dikaji di Kecamatan Kenjeran karena keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi pesisir perlu diikuti dengan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, pengakuan atas kontribusi ekonomi, serta kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kajian pemberdayaan perempuan pesisir di Kenjeran tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas, akses, kontrol, partisipasi, dan distribusi manfaat pembangunan yang berkeadilan *gender*.

Secara global, agenda kesetaraan *gender* masih berjalan lambat. UN Women dan UN DESA (2024) menyebutkan bahwa dunia masih belum berada pada lintasan yang memadai untuk memenuhi komitmen terhadap perempuan dan anak perempuan menjelang 2030. Dalam konteks pembangunan komunitas pesisir, perlambatan tersebut dapat tampak melalui program pemberdayaan yang berhenti pada pelatihan teknis, pemberian bantuan alat, atau penguatan usaha mikro tanpa disertai perubahan pada struktur akses pasar, kepemilikan aset, kepemimpinan kelompok, perlindungan sosial, serta sistem data terpilah. Karena itu, perspektif *Gender* dan Pembangunan (GAD) penting digunakan untuk membaca pemberdayaan sebagai proses yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam relasi sosial, ekonomi, politik, dan ekologis yang saling membentuk.

Kota Surabaya telah memiliki dasar kelembagaan pengarusutamaan *gender*. Profil *Gender* Tahun 2023 menjelaskan bahwa data *gender* dan anak menjadi elemen penting untuk membantu pengambil kebijakan memahami peran, situasi, dan kondisi perempuan serta laki-laki di Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya, 2023). Melalui Sistem Informasi *Gender* Arek Suroboyo (SIGAS), pemerintah kota juga menempatkan data terpilah sebagai mekanisme koordinasi untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program pembangunan

Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan
E-ISSN 2808-246X; P-ISSN 2808-3636
Volume 6, Issue 4, October 2026; Page, 2628-2640
Email: pantherajurnal@gmail.com

responsif *gender* (Pemerintah Kota Surabaya, 2026). Kerangka ini relevan dengan wilayah pesisir seperti Kenjeran karena kebijakan pemberdayaan memerlukan data yang tidak hanya memuat jumlah penduduk, tetapi juga memetakan jenis kerja, posisi dalam rantai nilai, kepemilikan aset, akses pasar, beban kerja domestik, serta kontrol perempuan atas hasil usaha.

Kenjeran merupakan kecamatan pesisir di Surabaya dengan dinamika kepadatan dan urbanisasi yang kuat. Publikasi Kecamatan Kenjeran dalam Angka 2025 mencatat penduduk Kenjeran tahun 2024 sebanyak 185.294 jiwa, terdiri atas 93.195 laki-laki dan 92.099 perempuan, dengan kepadatan 21.774 jiwa per km² (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025). Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa perempuan bukan kelompok *minor* secara demografis. Mereka merupakan hampir separuh penduduk dan hadir pada berbagai kelompok umur produktif.

Proporsi perempuan yang hampir seimbang dengan laki-laki menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi strategis sebagai bagian dari sumber daya manusia dalam pembangunan wilayah pesisir. Jumlah tersebut menjadi dasar penting bagi perancangan program pemberdayaan yang tidak hanya menempatkan perempuan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, pengelolaan sumber daya pesisir, dan pengambilan keputusan komunitas. Dengan demikian, desain pembangunan pesisir yang tidak memasukkan kebutuhan, potensi, dan kapasitas perempuan akan mengabaikan sebagian besar potensi sosial yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan komunitas.

Kajian terdahulu telah memberikan dasar penting mengenai perempuan Kenjeran. Windiani *et al.* (2022) meneliti pengembangan komunitas pesisir Kenjeran melalui pendekatan *participatory rural appraisal* dan menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai basis rekomendasi kebijakan. Putra *et al.* (2024) menunjukkan bahwa perempuan dalam usaha ikan asap Kejawan Lor, Kenjeran, berperan dalam penyiapan bahan baku, pembersihan, pengasapan, pendinginan, hingga pengemasan. Afifah *et al.* (2025) menemukan bahwa pedagang perempuan olahan ikan di Kawasan Pantai Kenjeran memanfaatkan media digital untuk membangun jejaring sosial dan mempertahankan usaha pada masa pandemi. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa perempuan Kenjeran bukan sekadar penerima manfaat program, tetapi pelaku ekonomi dan penjaga kontinuitas nafkah pesisir.

Meskipun demikian, terdapat celah ilmiah dan praktis. Pertama, kajian tentang perempuan pesisir sering menampilkan peran ekonomi perempuan, tetapi belum selalu menghubungkannya dengan sistem data terpilah dan perangkat pengarusutamaan *gender* di tingkat kota. Kedua, pembahasan pemberdayaan masih sering berpusat pada peningkatan pendapatan, padahal literatur mutakhir menekankan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan proses multidimensional yang berkaitan dengan sumber daya, agensi, keputusan, dan capaian kolektif (Yount *et al.*, 2026). Ketiga, evaluasi program pemberdayaan memerlukan indikator yang kontekstual agar keluaran program dapat dibedakan dari perubahan substantif pada kontrol, manfaat, dan posisi tawar perempuan (Yildirim & Koroglu, 2024). Kebaruan artikel ini terletak pada penyusunan model pengembangan komunitas pesisir responsif *gender* yang mengintegrasikan data

Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan
E-ISSN 2808-246X; P-ISSN 2808-3636
Volume 6, Issue 4, October 2026; Page, 2628-2640
Email: pantherajurnal@gmail.com

demografis Kenjeran 2025, infrastruktur PUG Kota Surabaya, dan literatur terbaru tentang perempuan pesisir serta ekonomi biru.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan: 1) menganalisis konteks demografis dan sosial-ekonomi Kenjeran sebagai basis pemberdayaan perempuan pesisir; 2) membaca peran perempuan Kenjeran dalam perspektif GAD melalui dimensi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat; dan 3) merumuskan model pengembangan komunitas pesisir responsif *gender* yang dapat digunakan sebagai rujukan awal bagi perencanaan program, pendampingan masyarakat, dan evaluasi pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi dokumenter. Desain ini dipilih karena artikel bertujuan menyusun analisis konseptual-aplikatif berbasis data sekunder dan dokumen publik yang dapat dilacak. Fokus kajian bukan melakukan survei lapangan baru, melainkan memadukan data resmi, literatur ilmiah mutakhir, dan kerangka *Gender* dan Pembangunan (GAD) untuk merumuskan model pemberdayaan perempuan pesisir Kenjeran yang dapat diuji lebih lanjut dalam penelitian lapangan.

Sumber data terdiri atas tiga kelompok. Pertama, data statistik resmi, terutama Kecamatan Kenjeran dalam Angka 2025 dari BPS Kota Surabaya. Kedua, dokumen kebijakan dan kelembagaan pengarusutamaan *gender*, seperti Profil *Gender* Tahun 2023 dan Sistem Informasi *Gender* Arek Suroboyo. Ketiga, artikel ilmiah dan laporan institusional yang membahas perempuan pesisir, ekonomi biru, pengarusutamaan *gender*, serta evaluasi pemberdayaan perempuan, terutama publikasi tahun 2022-2026. Literatur dipilih berdasarkan relevansi topik, keterlacakan daring, ketersediaan DOI atau laman resmi, dan kesesuaian dengan kebutuhan analisis GAD. Seluruh sumber tersebut dianalisis secara kritis untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi yang digunakan.

Analisis dilakukan melalui lima tahap. Tahap pertama adalah inventarisasi data untuk memisahkan informasi demografis, informasi kelembagaan PUG, dan temuan empiris tentang perempuan pesisir. Tahap kedua adalah reduksi data dengan memilih informasi yang terkait langsung dengan peran perempuan, akses terhadap sumber daya, partisipasi, kontrol, manfaat, dan keberlanjutan program. Tahap ketiga adalah pengodean tematik menggunakan lensa GAD, yaitu akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan akuntabilitas kelembagaan. Tahap keempat adalah triangulasi sumber dengan membandingkan data BPS, dokumen pemerintah, dan literatur ilmiah. Tahap kelima adalah sintesis model program yang memetakan masalah, strategi intervensi, aktor, indikator, dan keluaran yang diharapkan.

Validitas kajian dijaga melalui keterlacakan sumber, konsistensi sitasi, dan penggunaan data yang tidak direkayasa. Setiap data kuantitatif yang ditampilkan berasal dari dokumen resmi, sedangkan interpretasi diarahkan sebagai analisis konseptual dan rekomendasi program. Keterbatasan metode ini adalah tidak adanya wawancara langsung dengan perempuan Kenjeran dalam draf ini. Oleh karena itu, model yang ditawarkan perlu divalidasi melalui observasi, diskusi kelompok terarah, dan wawancara mendalam pada tahap penelitian berikutnya.

Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan
E-ISSN 2808-246X; P-ISSN 2808-3636
Volume 6, Issue 4, October 2026; Page, 2628-2640
Email: pantherajurnal@gmail.com

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Demografis Kenjeran sebagai Basis Pemberdayaan

Data demografis menunjukkan bahwa Kenjeran merupakan kecamatan padat penduduk dengan struktur perempuan dan laki-laki yang relatif seimbang. Total penduduk tahun 2024 mencapai 185.294 jiwa, terdiri atas 93.195 laki-laki dan 92.099 perempuan. Rasio jenis kelamin kecamatan sebesar 101,19 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi, tetapi secara substantif perempuan tetap menjadi basis sosial yang besar dalam pembangunan kawasan. Kepadatan penduduk 21.774 jiwa per km² menandakan tekanan ruang dan kebutuhan layanan yang tinggi, terutama pada kelurahan dengan konsentrasi penduduk besar seperti Sidotopo Wetan dan Tanah Kali Kedinding (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025).

Pola ini penting bagi pemberdayaan perempuan. Dalam komunitas padat, program ekonomi tidak dapat hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga perlu memperhatikan ruang kerja, sanitasi, penyimpanan produk, keamanan pangan, mobilitas, akses pasar, dan pembagian waktu antara kerja produktif serta kerja perawatan keluarga. Bila kelompok umur 15-64 tahun dijumlahkan dari data BPS, terdapat sekitar 64.796 perempuan pada rentang usia produktif. Angka tersebut memperkuat kebutuhan penyusunan program berbasis siklus hidup: perempuan muda membutuhkan literasi digital dan akses keterampilan, perempuan usia kerja membutuhkan dukungan usaha dan pasar, sedangkan perempuan lansia membutuhkan perlindungan sosial serta pengakuan atas pengetahuan lokal.

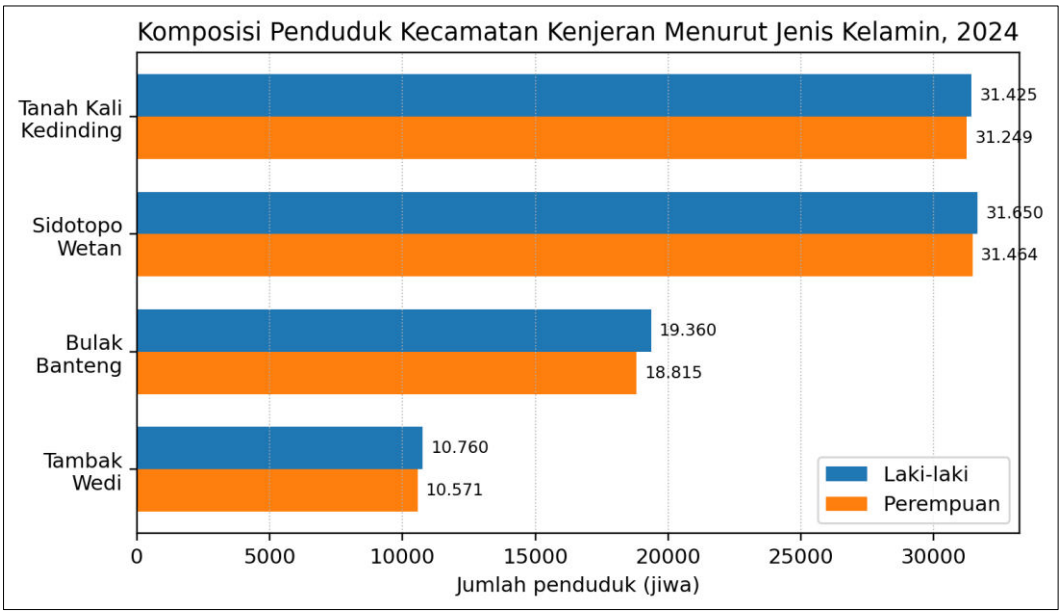
Selain aspek jumlah dan struktur umur penduduk, kondisi demografis Kenjeran juga perlu dipahami melalui persebaran penduduk dan karakteristik sosial ekonomi antarwilayah kelurahan. Perbedaan kepadatan, aksesibilitas, dan aktivitas ekonomi dapat memengaruhi peluang perempuan dalam memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, serta mengakses fasilitas pendukung. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah melalui pemetaan potensi perempuan, identifikasi kebutuhan kelompok rentan, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Pendekatan tersebut mampu mendorong partisipasi perempuan secara lebih inklusif sekaligus memastikan bahwa program pemberdayaan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat pesisir Kenjeran.

Tabel 1. Profil Demografis Kelurahan di Kecamatan Kenjeran Tahun 2024.

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Total	Distribusi (%)	Kepadatan/km²	Rasio JK
Tanah Kali Kedinding	31.425	31.249	62.674	33,82	23.651	100,56
Sidotopo Wetan	31.650	31.464	63.114	34,06	34.870	100,59
Bulak Banteng	19.360	18.815	38.175	20,60	13.348	102,90
Tambak Wedi	10.760	10.571	21.331	11,51	17.925	101,79
Kecamatan Kenjeran	93.195	92.099	185.294	100,00	21.774	101,19

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2025).

Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan
E-ISSN 2808-246X; P-ISSN 2808-3636
Volume 6, Issue 4, October 2026; Page, 2628-2640
Email: pantherajurnal@gmail.com



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2025).

Gambar 1. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kenjeran Tahun 2024.

Perempuan dalam Rantai Nilai Pesisir Kenjeran

Temuan literatur lokal menunjukkan bahwa perempuan di Kenjeran aktif dalam rantai nilai olahan ikan. Dalam usaha ikan asap Kejawan Lor, perempuan terlibat sejak penyiapan bahan baku, pembersihan, pengasapan, pendinginan, sampai pengemasan (Putra *et al.*, 2024). Peran ini tidak dapat disebut sebagai kerja tambahan, karena keberhasilan produk ikan asap sangat bergantung pada ketelitian proses, kualitas bahan, pengendalian waktu, pengemasan, dan daya tahan produk. Pada tahap pemasaran, studi Afifah *et al.* (2025) menunjukkan bahwa pedagang perempuan olahan ikan memanfaatkan media digital untuk memperkuat jejaring sosial dan mempertahankan usaha pada masa penurunan kunjungan wisata akibat pandemi. Hal ini memperlihatkan kemampuan adaptasi perempuan terhadap perubahan pasar dan pembatasan mobilitas.

Namun, keterlibatan kerja tidak otomatis menunjukkan tercapainya pemberdayaan perempuan. Perbedaan keduanya dapat dilihat melalui sejumlah indikator, seperti kepemilikan atau akses terhadap alat produksi, kewenangan menentukan harga jual, kontrol atas pendapatan dan pembagian laba, kepemilikan merek serta legalitas usaha, akses terhadap modal dan informasi pasar, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan kelompok. Perempuan dapat dikatakan memiliki posisi yang lebih berdaya apabila tidak hanya terlibat dalam proses produksi, tetapi juga mempunyai kendali terhadap sumber daya, hasil ekonomi, dan keputusan yang memengaruhi keberlanjutan usahanya. Pasar perikanan dan olahan hasil laut dapat tetap menghasilkan ketimpangan apabila perempuan hanya ditempatkan pada pekerjaan padat waktu, berupah rendah, tidak terdokumentasi, dan tidak memiliki kontrol atas harga, merek, perizinan, alat produksi, atau keputusan kelompok. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan perlu diarahkan pada pemerataan manfaat ekonomi.

Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan
E-ISSN 2808-246X; P-ISSN 2808-3636
Volume 6, Issue 4, October 2026; Page, 2628-2640
Email: pantherajurnal@gmail.com

Pasaribu & Machdani (2025) menekankan bahwa perempuan pesisir yang berperan dalam pengolahan, pemasaran, dan pemeliharaan mata pencaharian berbasis laut masih sering kurang terwakili dalam tata kelola ekonomi biru. Purwanti *et al.* (2022) juga menunjukkan bahwa perempuan nelayan di Indonesia sering terabaikan akibat bias sosial-budaya dan keterbatasan pengakuan hukum serta program afirmatif. Oleh sebab itu, program Kenjeran perlu bergerak dari logika bantuan menuju transformasi relasi akses dan kontrol melalui penguatan kepemilikan sumber daya produktif, kemandirian ekonomi, serta keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Perspektif GAD memandang perempuan bukan sebagai kelompok rentan yang harus dibantu secara pasif, melainkan sebagai aktor pembangunan yang memiliki pengetahuan, jaringan, dan strategi bertahan. Peran perempuan dalam olahan ikan, pemasaran, dan jejaring digital perlu diterjemahkan menjadi desain program yang memberi ruang bagi kepemimpinan perempuan, kepemilikan merek, literasi keuangan, sertifikasi produk, *higiene* pangan, negosiasi harga, dan pengelolaan kolektif. Dengan demikian, pemberdayaan tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi menyentuh kemampuan perempuan untuk mengubah keputusan dan struktur peluang.

Pembacaan GAD: Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat

Lensa GAD membantu membedakan antara partisipasi nominal dan pemberdayaan substantif. Partisipasi nominal terjadi ketika perempuan hadir dalam kegiatan, mengikuti pelatihan, atau menerima bantuan. Pemberdayaan substantif terjadi ketika perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya produktif, ikut menentukan desain program, memiliki kontrol atas hasil usaha, dan merasakan manfaat yang terukur bagi kesejahteraan keluarga serta komunitas. Yount *et al.* (2026) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan bersifat multidimensional dan multilevel karena melibatkan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, agensi individual, agensi interpersonal, dan agensi kolektif. Kerangka ini sesuai dengan komunitas pesisir, sebab hambatan perempuan tidak hanya berasal dari modal usaha, tetapi juga dari norma, pembagian kerja rumah tangga, jaringan pasar, kepemilikan alat, serta posisi dalam kelembagaan lokal.

Kebutuhan utama perempuan pesisir Kenjeran dari aspek akses mencakup peralatan produksi yang higienis, ruang pengolahan yang layak, modal mikro yang tidak membebani, pelatihan standar keamanan pangan, pemasaran digital, perizinan usaha, serta akses terhadap informasi program. Pada dimensi partisipasi, perempuan perlu dilibatkan sejak pemetaan kebutuhan, perencanaan program, penentuan jenis bantuan, penyusunan jadwal pelatihan, sampai pemilihan indikator keberhasilan. Pada dimensi kontrol, program harus memastikan bahwa perempuan tidak hanya bekerja, tetapi juga memiliki suara dalam penentuan harga, penggunaan laba, pembelian alat, perluasan pasar, dan pengambilan keputusan kelompok. Pada dimensi manfaat, perubahan perlu diukur melalui pendapatan bersih, kestabilan usaha, penurunan beban kerja yang tidak dibayar, peningkatan rasa percaya diri, akses jejaring, serta ketahanan keluarga menghadapi perubahan ekonomi.

Surabaya telah memiliki perangkat PUG yang dapat memperkuat dimensi tersebut. SIGAS mendorong pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan,

Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan
E-ISSN 2808-246X; P-ISSN 2808-3636
Volume 6, Issue 4, October 2026; Page, 2628-2640
Email: pantherajurnal@gmail.com

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program responsif *gender* (Pemerintah Kota Surabaya, 2026). Tantangannya adalah menghubungkan data makro PUG dengan data mikro komunitas pesisir. Data jumlah penduduk menurut jenis kelamin sudah tersedia, tetapi perencanaan pemberdayaan membutuhkan data nafkah pesisir yang lebih spesifik: siapa yang mengolah ikan, siapa yang memiliki alat, siapa yang mengakses kredit, siapa yang mengurus perizinan, siapa yang memegang akun pemasaran digital, siapa yang menghadiri musyawarah, dan siapa yang mengambil keputusan atas pendapatan. Tanpa data semacam ini, program mudah terlihat responsif *gender* secara administratif tetapi belum tentu mengubah struktur manfaat.

Tabel 2. Diagnosis GAD untuk Pemberdayaan Perempuan Pesisir Kenjeran.

Dimensi GAD	Indikasi Empiris	Risiko Utama	Arah Intervensi
Akses	Perempuan terlibat dalam pengolahan, pengemasan, pemasaran, dan jejaring digital.	Akses alat, modal, legalitas, ruang produksi, dan informasi program tidak merata.	Paket akses produktif: alat higienis, modal mikro, sertifikasi, perizinan, literasi digital, dan pendampingan pasar.
Partisipasi	Perempuan hadir sebagai pelaku usaha dan anggota kelompok komunitas.	Kehadiran belum selalu berarti suara dalam desain program dan keputusan kelompok.	Musyawarah terpilah, jadwal ramah kerja perawatan, kuota kepemimpinan, dan fasilitator perempuan.
Kontrol	Perempuan mengelola sebagian proses produksi dan pemasaran.	Kontrol atas harga, merek, aset, laba, dan kemitraan dapat tetap dikuasai pihak lain.	Perjanjian kelompok, pencatatan keuangan, rekening usaha, hak atas merek kolektif, dan pelatihan negosiasi.
Manfaat	Usaha olahan ikan menjadi sumber nafkah dan ketahanan keluarga.	Manfaat program hanya diukur dari jumlah pelatihan atau bantuan, bukan perubahan kesejahteraan.	Indikator hasil: pendapatan bersih, akses pasar, keputusan usaha, waktu kerja, keamanan pangan, dan ketahanan usaha.
Akuntabilitas	Surabaya memiliki perangkat data PUG dan SIGAS.	Data PUG belum otomatis mencerminkan pekerjaan informal perempuan pesisir.	Basis data nafkah pesisir terpilah, monitoring tahunan, dan evaluasi partisipatif berbasis bukti.

Sumber: Sintesis Penulis Berdasarkan Afifah *et al.* (2025), BPS Kota Surabaya (2025), Pasaribu & Machdani (2025), Pemerintah Kota Surabaya (2023, 2026), Purwanti *et al.* (2022), serta Putra *et al.* (2024).

Model Pengembangan Komunitas Pesisir Responsif Gender

Berdasarkan hasil sintesis data empiris dan kajian literatur, penelitian ini merumuskan Model Pemberdayaan Komunitas Pesisir Responsif *Gender* Kenjeran (MPKPRG-Kenjeran) yang terdiri atas lima komponen utama. Model ini dirancang sebagai kerangka pengembangan komunitas pesisir yang mengintegrasikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat ekonomi

Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan
E-ISSN 2808-246X; P-ISSN 2808-3636
Volume 6, Issue 4, October 2026; Page, 2628-2640
Email: pantherajurnal@gmail.com

bagi perempuan dalam kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan. Komponen pertama adalah basis data terpilah. Program perlu memutakhirkan data perempuan pelaku usaha olahan ikan yang mencakup peran dalam rantai nilai, kepemilikan alat produksi, akses modal, legalitas usaha, pemanfaatan *platform digital*, pendapatan bersih, beban kerja domestik, serta keikutsertaan dalam forum pengambilan keputusan. Komponen ini menjadi landasan perumusan kebijakan dan intervensi program karena pembangunan ekonomi pesisir yang responsif *gender* memerlukan informasi empiris mengenai kondisi, kebutuhan, dan kesenjangan yang dialami perempuan, bukan sekadar asumsi bahwa keterlibatan ekonomi telah mencerminkan kesetaraan *gender*.

Komponen kedua adalah perluasan akses produktif. Perempuan membutuhkan dukungan yang saling terhubung, bukan pelatihan tunggal. Dukungan tersebut mencakup alat produksi higienis, ruang pengolahan bersama, penyimpanan dingin sederhana, kemasan, label, sertifikasi pangan, perizinan usaha, pembukuan, literasi keuangan, dan akses pembiayaan yang tidak memperbesar beban utang. Komponen ketiga adalah penguatan agensi. Agensi dibangun melalui pelatihan kepemimpinan, komunikasi, negosiasi harga, pengelolaan kelompok, literasi digital, dan dukungan keluarga agar kerja produktif perempuan tidak menambah beban ganda secara tidak adil.

Komponen keempat adalah integrasi pasar. Perempuan Kenjeran perlu difasilitasi untuk terhubung dengan pasar wisata, pasar daring, koperasi, hotel/restoran lokal, toko oleh-oleh, sekolah, dan *platform* ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, digitalisasi bukan hanya penggunaan media sosial, melainkan strategi membangun reputasi produk, memperluas jejaring, mengelola pesanan, membaca preferensi konsumen, dan memperkuat posisi tawar. Komponen kelima adalah akuntabilitas program berbasis indikator. Evaluasi harus bergerak dari pertanyaan "berapa banyak perempuan dilatih" menuju "apa yang berubah pada akses, kontrol, pendapatan, waktu, keamanan pangan, jaringan, dan kepemimpinan perempuan". Pendekatan ini sejalan dengan literatur evaluasi pemberdayaan yang menekankan pentingnya indikator dampak yang kontekstual dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Yildirim & Koroglu, 2024).

Model ini juga perlu ditempatkan dalam arah kebijakan yang lebih luas. KemenPPPA RI (2025) menegaskan revitalisasi pengarusutamaan *gender* melalui integrasi *gender* dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Bila diterapkan di Kenjeran, arah tersebut berarti setiap program pesisir perlu memiliki analisis *gender* sejak awal, anggaran yang menjawab kebutuhan berbeda perempuan dan laki-laki, pelaksanaan yang melibatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, serta laporan yang menunjukkan manfaat terpilah.

Tabel 3. Rancangan Model Program Pemberdayaan Perempuan Pesisir Kenjeran.

Komponen Model	Kegiatan Kunci	Aktor Utama	Indikator Utama	Keluaran yang Diharapkan
Basis Data Terpilah	Pendataan pelaku usaha, peran kerja, aset, pendapatan,	Kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, kader, perguruan	Tersedia data perempuan-laki-laki menurut peran nafkah	Peta kebutuhan dan potensi perempuan pesisir berbasis

Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan
E-ISSN 2808-246X; P-ISSN 2808-3636
Volume 6, Issue 4, October 2026; Page, 2628-2640
Email: pantherajurnal@gmail.com

Komponen Model	Kegiatan Kunci	Aktor Utama	Indikator Utama	Keluaran yang Diharapkan
	akses pasar, dan kepemimpinan.	tinggi.	pesisir.	bukti.
Akses Produktif	Pelatihan pangan, alat produksi, legalitas, pembukuan, modal, dan kemasan.	Dinas koperasi/UMKM, perikanan, perguruan tinggi, BUMN/CSR.	Jumlah usaha memiliki legalitas, kemasan, pembukuan, dan akses pembiayaan aman.	Usaha lebih layak, higienis, dan siap pasar.
Agensi dan Kepemimpinan	Pelatihan negosiasi, kepemimpinan, literasi digital, dan dukungan keluarga.	Kelompok perempuan, tokoh lokal, fasilitator, organisasi masyarakat.	Perempuan memimpin forum, mengambil keputusan, dan mengelola akun usaha.	Peningkatan posisi tawar dan kepercayaan diri kolektif.
Integrasi Pasar	Kemitraan toko oleh-oleh, wisata, sekolah, hotel, restoran, dan *platform* daring.	Kelompok usaha, koperasi, pelaku wisata, *marketplace* lokal.	Jumlah kemitraan, pesanan, variasi produk, dan jangkauan pasar.	Pendapatan bersih dan stabilitas usaha meningkat.
Akuntabilitas	Monitoring indikator GAD, audit manfaat, dan pelaporan ke sistem PUG/SIGAS.	Pemkot Surabaya, kecamatan, komunitas, akademisi.	Laporan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terpilah.	Program berkelanjutan dan dapat diperbaiki berbasis data.

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan perspektif GAD dan literatur pemberdayaan perempuan pesisir.

Implikasi bagi Pengembangan Masyarakat dan Pendidikan Pemberdayaan

Implikasi pertama adalah pentingnya mengubah pendekatan program dari berbasis kegiatan menuju berbasis perubahan. Dalam praktik pemberdayaan, keberhasilan sering dihitung dari jumlah peserta, jumlah pelatihan, jumlah bantuan, atau jumlah produk. Ukuran tersebut penting, tetapi belum cukup. Program responsif *gender* harus mampu menunjukkan apakah perempuan memperoleh akses baru, lebih banyak suara, kontrol lebih besar atas keputusan ekonomi, dan manfaat yang lebih adil. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengembangan masyarakat pesisir sebaiknya disertai instrumen sederhana untuk mengukur perubahan sebelum dan sesudah program.

Implikasi kedua adalah perlunya pendidikan pemberdayaan yang kontekstual. Materi pelatihan bagi perempuan Kenjeran perlu disusun berdasarkan kegiatan ekonomi yang nyata, seperti pengolahan ikan, pengemasan, pemasaran digital, keamanan pangan, pengelolaan limbah, pembukuan, dan negosiasi harga. Pendampingan juga perlu melibatkan laki-laki, keluarga, ketua RT/RW, pelaku wisata, dan perangkat kelurahan agar perubahan tidak dibebankan sepenuhnya kepada perempuan. Dalam pendekatan GAD, pemberdayaan perempuan tidak

berarti menambah beban perempuan, tetapi menata ulang relasi kerja, manfaat, dan dukungan sosial agar pembangunan menjadi lebih adil.

Implikasi ketiga adalah perlunya integrasi dengan agenda ekonomi biru. Pemberdayaan perempuan pesisir dapat mendukung ekonomi biru apabila usaha olahan ikan memperhatikan mutu, keamanan pangan, pengurangan limbah, pengemasan ramah lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya. Dengan demikian, perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai pelaku ekonomi mikro, tetapi juga sebagai aktor transisi menuju tata kelola pesisir yang inklusif.

SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan pesisir Kenjeran dalam perspektif *Gender* dan Pembangunan (GAD) perlu dimulai dari pengakuan bahwa perempuan merupakan aktor penting dalam rantai nilai pesisir, bukan sekadar penerima manfaat program. Data Kenjeran 2025 memperlihatkan jumlah perempuan yang hampir seimbang dengan laki-laki dalam ruang kecamatan yang padat penduduk. Literatur lokal memperkuat bahwa perempuan berperan dalam produksi ikan asap, pengemasan, pemasaran, dan jejaring digital. Namun, peran tersebut berisiko tetap tidak terlihat apabila perencanaan hanya menggunakan data demografis umum dan belum memetakan kerja *informal*, aset produktif, pengambilan keputusan, serta manfaat ekonomi perempuan.

Perspektif GAD menekankan bahwa pemberdayaan perempuan pesisir Kenjeran perlu diarahkan pada penguatan akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan akuntabilitas kelembagaan. Artikel ini menawarkan model lima komponen yang meliputi basis data terpilah, perluasan akses produktif, penguatan agensi, integrasi pasar, dan akuntabilitas program berbasis indikator. Model tersebut dapat menjadi kerangka awal bagi pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, perguruan tinggi, dan komunitas lokal untuk menyusun program pemberdayaan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memperkuat posisi tawar, kepemimpinan, dan manfaat ekonomi perempuan pesisir.

SARAN

Penelitian berikutnya perlu melakukan validasi lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terarah dengan perempuan pengolah ikan, pedagang olahan ikan, anggota keluarga, perangkat kelurahan, pelaku wisata, dan perangkat daerah terkait. Validasi tersebut penting untuk memastikan bahwa model yang disusun benar-benar sesuai dengan pengalaman perempuan Kenjeran, termasuk hambatan akses modal, waktu kerja, mobilitas, pengasuhan, legalitas usaha, dan negosiasi pasar.

Pemerintah Kota Surabaya dan pemangku kepentingan lokal disarankan mengembangkan basis data nafkah pesisir terpilah yang terhubung dengan agenda PUG/SIGAS. Program pemberdayaan sebaiknya disusun dalam siklus tahunan yang memuat analisis *gender*, anggaran responsif *gender*, indikator hasil, dan evaluasi partisipatif. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra pendamping melalui riset aksi, pelatihan keamanan pangan, penguatan merek, pemasaran digital, dan evaluasi dampak berbasis data. Keberlanjutan program perlu didukung oleh koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada lembaga penyedia data publik, khususnya BPS Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya, yang telah menyediakan data dan dokumen pengarusutamaan *gender* yang dapat diakses publik. Terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti terdahulu yang telah mendokumentasikan peran perempuan pesisir Kenjeran sehingga kajian ini dapat disusun sebagai sintesis awal untuk pengembangan program yang lebih responsif *gender*.

DAFTAR RUJUKAN

Afifah, I., Wijaya, M. H. D., & Ridwan, A. (2025). Development of Social Networks in Women Traders Processing Fish in Kenjeran Beach Area of Surabaya During the Covid-19 Pandemic. *E-SOSPOL, 12*(1), 27-41. https://doi.org/10.19184/e-sospol.v12i1.53699

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2025). Retrieved June 15, 2026, from Kecamatan Kenjeran dalam Angka 2025. Interactwebsite: https://surabayakota.bps.go.id

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). Retrieved June 15, 2026, from Gender in Fisheries and Aquaculture. Interactwebsite: https://www.fao.org/gender/learning-center/thematic-areas/gender-in-fisheries-and-aquaculture/en

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). Retrieved June 15, 2026, from Kemen PPPA Mulai Persiapkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Evaluasi Pengarusutamaan *Gender*. Interactwebsite: https://www.kemenpppa.go.id

Pasaribu, I. F., & Machdani, S. (2025). Mainstreaming Gender in the Blue Economy in Indonesia: Literature Review from an Ecological and Maritime Feminism Perspective. *Journal of Urban Sociology, 8*(2), 99-107. https://doi.org/10.30742/jus.v8i2.4411

Pemerintah Kota Surabaya. (2023). Retrieved June 15, 2026, from Profil *Gender* Tahun 2023. Interactwebsite: https://dp3appkb.surabaya.go.id/sigas/

Pemerintah Kota Surabaya. (2026). Retrieved June 15, 2026, from Sistem Informasi *Gender* Arek Suroboyo (SIGAS). Interactwebsite: https://dp3appkb.surabaya.go.id/sigas/

Purwanti, A., Wijaningsih, D., Mahfud, M. A., & Natalis, A. (2022). Gender Inequality Against Women Fishers in Indonesia. *Indonesia Law Review, 12*(3), 121-136. https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n3.5

Putra, A. P., Hendarto, T., Wijayanti, R. F., Hayati, N., Agustini, M., Muhajir, M., Wirawan, I., Budiyanto, D., Sucahyo, M. B. S., Hariyani, N., & Sulistiawati, A. (2024). Pelatihan Manajemen Produksi Ikan Asap pada Kelompok Usaha Kecil Ikan Asap di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), 5*(4), 4874-4880. http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4352

UN Women & United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). Retrieved June 15, 2026, from Progress on the Sustainable

Development Goals: The Gender Snapshot 2024. Interactwebsite: https://knowledge.unwomen.org/

Windiani, W., Soedarso, S., Suryani, A., Setyaningsih, Y., Fatthatin, B., Aprilinda, K. A., & Febrianti, P. R. (2022). Coastal Community Development in Gender and Development Perspective: Study of Women's Empowerment in the Kenjaran Area of Surabaya. *Indonesian Journal of Development Studies, 2*(1), 53-69. https://doi.org/10.12962/j29649714.v2i1.7918

Yildirim, N., & Koroglu, F. (2024). Revisiting the Impact Evaluation of Women's Empowerment: A MCDM-Based Evaluation Indicator Selection Framework Proposal. *Social Indicators Research, 172*, 121-145. https://doi.org/10.1007/s11205-023-03302-7

Yount, K. M., Quisumbing, A., Meinzen-Dick, R., Malapit, H., Hassan, M. Z., & WEMNS Study Team. (2026). Women's Empowerment Metric for National Statistical Systems (WEMNS): Development and Psychometric Assessment of a Face-to-Face Survey Module. *PLOS One, 21*(5), e0345742. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0345742